



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(L A K I P)
TAHUN 2016
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

DI SUSUN OLEH :

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH

Jl. Gunung Tua-Padangsimpnan Km. 3 Telp (0635) 510825, Fax. (0635) 510825, E-mail. dppkadpaluta@gmail.com

GUNUNG TUA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014 – 2018, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan TAP MPR Nomor XI / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor : 7/1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), menginstruksikan kepada setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir periode Tahun Anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban pimpinan satuan kerja instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan. Akuntabilitas Kinerja didukung dengan satu sistem yang disebut SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 ini merupakan salah satu sistem penilaian capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebagai salah satu SKPD yang ada di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selama periode Tahun Anggaran 2016.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditetapkan adalah "**MEWUJUDKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG WAJAR**".

Dijabarkan menjadi 3 (tiga) misi, yaitu :

Optimalisasi Pendapatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan.

Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan perubahan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selanjutnya menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah terhitung per 1 Januari 2017.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2016 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat khususnya bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Gunungtua, Januari 2017

KEPALA BADAN PKPAD

RIDI AP, MM

NIP.19730422 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftas Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Organisasi	3
B. Kewenangan yang diberikan pada Instansi	5
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	5
2. Aspek-aspek Strategik Organisasi	6
3. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. Rencana Strategis	8
a. Visi dan Misi	9
b. Tujuan Strategis	10
c. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah	11
d. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	12
2. Penetapan Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Pengukuran Capaian Kinerja	25
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	40
2. Langkah Ke Depan	41
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu Satuan Kerja Instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan Daerah melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pengukuran Kinerja yang telah direncanakan adalah merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai apakah organisasi dan manajemen dalam melaksanakan kagiatannya melayani publik telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Evaluasi Kinerja merupakan dilakukannya perbandingan kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kerja nyata yang direncanakan, dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, dengan kinerja instansi pemerintah yang lain atau swasta yang unggul, dengan kinerja nyata instansi pemerintah daerah lain atau standar nasional yang mencakup efisiensi dan efektivitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja bukanlah sekedar menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan telah sesuai dengan perencanaan, akan tetapi menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, berhasil guna dan telah berdaya guna.

Laporan Akuntabilitas Kinerja haruslah jujur, objektif, akurat dan transparan sehingga memuat informasi yang proporsional dalam lingkup kinerja dan tanggungjawab yang memuat kegagalan dan keberhasilan. Informasi yang disajikan juga yang sifatnya penting serta relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggungjawaban sehingga pada akhirnya manfaat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja itu lebih besar dari pada biaya penyusunannya dan untuk peningkatan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berdaya banding tinggi (reliable) dan berdaya uji (verifiable) merupakan satu faktor utama berhasilnya suatu instansi/organisasi pemerintah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Padang Lawas Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010, memiliki 2 (dua) tugas penting yang bersifat integral didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu : Menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014 – 2018, dengan asumsi bahwa target yang telah ditetapkan secara optimal harus bisa dicapai, dan secara Struktural sebagai perangkat daerah dituntut pula untuk menunjang pencapaian Visi Bupati Padang Lawas Utara “Mewujudkan Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradab” yang secara proporsional ditetapkan dalam APBD Padang Lawas Utara pada setiap tahunnya. Pencapaian Visi Padang Lawas Utara ini diwujudkan secara bertahap melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara periode 2014 – 2018 yaitu “Mewujudkan Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradab”.

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dijelaskan dalam Renstra adalah **“MEWUJUDKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG WAJAR DAN TRANSPARAN”**.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 misi, 5 tujuan, 7 sasaran yang selanjutnya dituangkan ke dalam 6 Kebijakan dan 9 program. Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Rencana Strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Padang Lawas Utara, maka sebagai acuan utama yang harus dipegang oleh para pemeran organisasi adalah rumusan yang menjadi tujuan dan sasaran selama tahun 2016 yang pada dasarnya juga merupakan bagian Rencana Strategik tahun 2014 – 2018 yaitu :

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya pelaksanaan penataan kelembagaan organisasi	a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dan penggunaan anggaran yang seimbang yang berorientasi pada kepentingan publik.
	b. Mewujudkan optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah terutama dari komponen Pendapatan Asli Daerah yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Tujuan	Sasaran
	c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Asset
2. Meningkatnya pelaksanaan penataan pelayanan administrasi perkantoran	d. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang akuntabel dan profesional.
3. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	e. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas Aparatur sesuai dengan tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.
4. Meningkatnya pengembangan sistem pengendalian manajemen	f. Meningkatnya Kinerja SKPD.
5. Meningkatnya kualitas penyajian laporan keuangan daerah	g. Meningkatnya kualitas dan efektifitas pelaporan keuangan.

Pelaksanaan Kinerja Tahun 2014 dari 4 misi, 5 tujuan, 7 sasaran dan 6 kebijakan tersebut dalam proses perjalanannya dapat dilaksanakan 9 Program dengan 48 Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi internal dengan melakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran terhadap 7 sasaran dengan 7 indikator sasaran yaitu :

1. Ranperda APBD tepat waktu.
2. Perda APBD tepat waktu.
3. Persentase Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah.
4. Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah.
5. Persentase Efisiensi Belanja.
6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.
7. Persentase pegawai yang memiliki kualifikasi S1 Akuntansi.

Maka untuk Rencana Tingkat Capaian, Realisasi Persentase Rencana Tingkat Capaian, dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah sudah dilaksanakan dengan menyerap dana 97,16% dengan realisasi 100% dalam tahap pembuatan Ranperda. Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan sesuai harapan.

Kelompok sasaran kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.			
Indikator	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
Masukan : Tersedianya Dana	1.507.343.000,00	1.464.589.250,00	97,16
Keluaran : Pengembangan dan Pemutakhiran Data Objek PBB-P2.	1	1	100%
Hasil yang dicapai : Pendapatan Daerah dapat meningkat dengan optimal.	95%	95%	95%

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang diharapkan adalah tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Padang Lawas Utara Per Tahun Anggaran.

Kelompok sasaran kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.			
Indikator	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
Masukan : Tersedianya Dana	596.312.000,00	569.326.086,00	95,47
Keluaran : 1. Terbitnya Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016. 2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2017.	2	2	100%
Hasil yang dicapai : Dinas/unit kerja dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Perbub tentang Penjabaran APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan.	95%	95%	95%

3. Persentase Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah

Rasio Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 94,16%

Kelompok sasaran kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.			
Indikator	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah	13.241.051.957,00	12.467.710.397,00	94,16

4. Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah

Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah adalah sebesar 94,75%.

Kelompok sasaran kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.			
Indikator	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Tidak Langsung	3.489.374.078,65	3.306.072.181,00	94,75

5. Persentase Efisiensi Belanja

Kelompok sasaran kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.			
Indikator	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
Persentase efisiensi belanja	16.730.426.035,65	15.773.782.578,00	94,28

6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2015 adalah dengan hasil WDP, dengan tercapainya hasil tersebut dikarenakan adanya kerja keras dan kerjasama yang baik.

7. Persentase Pegawai yang memiliki kualifikasi S1

Kelompok sasaran kegiatan : Peningkatan wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan perundangan yang berlaku			
Indikator	Rencana	Realisasi	% tase
Persentase Pegawai yang memiliki kualifikasi S1	8	4	50,00

Pengadaan pegawai yang mempunyai kualifikasi S1 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk tahun anggaran 2016 telah melampaui target dengan capaian 50,00%, maka kegiatan ini dapat dikategorikan dapat mencapai target yaitu sesuai harapan.

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa permasalahan/hambatan yang dijumpai antara lain :

Dalam aktivitas ekstensifikasi belum dapat dilaksanakan diversifikasi dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ada, karena kondisi masyarakat pada umumnya belum bisa menerima terjadinya peningkatan aktivitas pada suatu kegiatan yang dapat secara langsung berdampak kepada peningkatan pajak atau retribusi daerah.

Belum terpenuhinya kegiatan yang khusus untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan pelatihan lokakarya, seminar bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga penyelenggara lainnya.

Terbatasnya potensi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara kedepan.